



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**



**RENCANA AKSI ATAS  
PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga RSUD Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

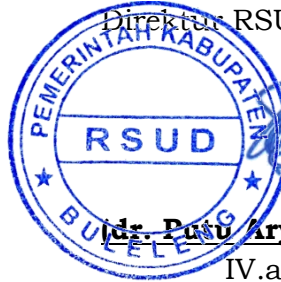
Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan dokumen rencana aksi dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar pihak-pihak terkait mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, Januari 2021

Direktur RSUD Kabupaten Buleleng



**Dr. Pusi Arya Nugraha, Sp. PD.**

IV.a / Pembina

NIP. 19750601 200212 1 009

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>DaftarIsi .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng .....	2
1.3.Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja .....	3
<b>BAB II Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>5</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	5
2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama.....	5
<b>BAB III Penutup.....</b>	<b>8</b>

Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2021

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem ini merupakan intergrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Salah satu komponen dalam sistem ini adalah Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja ini memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selain memuat perjanjian penugasan/pemberian amanah, perjanjian kinerja ini juga memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan serta rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Rencana kerja nyata perjanjian kinerja kemudian dituangkan lagi dalam Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja

RSUD Kabupaten Buleleng sebagai salah satu instansi pemerintah menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja 2021 yang telah disusun. Dokumen ini memuat target indikator kinerja masing-masing triwulan serta anggaran program/kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dokumen ini bisa digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja per triwulan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

## **1.2. Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Buleleng**

Struktur organisasi RSUD Kabupaten Buleleng diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja RSUD kabupaten Buleleng dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng. RSUD Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh seorang Direktur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari :
  - a.1 Bagian Pelayanan Medis terdiri dari :
    - Sub Bagian Pelayanan Medis Rawat Inap dan Intensif
    - Sub Bagian Pelayanan Medis Rawat Darurat dan Rawat Jalan
  - a.2 Bagian Pelayanan Keperawatan terdiri dari :
    - Sub Bagian Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan
    - Sub Bagian Pelayanan Keperawatan Rawat Darurat dan Intensif
  - a.3 Bagian Pelayanan Penunjang terdiri dari :
    - Sub Bagian Penunjang Medik
    - Sub Bagian Penunjang Non Medis
- b. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia terdiri dari :
  - b.1 Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari :
    - Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medis
    - Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Non Medis

b.2 Bagian Kesekretariatan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- Sub Bagian Kepegawaian dan SDM
- Sub Bagian Tata Usaha dan Organisasi

b.3 Bagian Pelaporan dan Informasi terdiri dari :

- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat

c. Wakil Direktur Keuangan terdiri dari :

c.1 Bagian Keuangan terdiri dari :

- Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi
- Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

c.2 Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Penyusunan Anggaran

c.3 Bagian Aset terdiri dari :

- Sub Bagian Penatausahaan Barang
- Sub Bagian Perlengkapan

### **1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja**

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja per triwulan, program, kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan guna mencapai hasil (outcome) yang diinginkan. Adapun tujuan disusunnya dokumen rencana aksi atas Perjanjian Kinerja adalah :

a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah

- b) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- c) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- d) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



## **BAB II**

### **RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Visi RSUD Kabupaten Buleleng adalah menjadi Rumah Sakit pilihan utama masyarakat dengan memberikan pelayanan berkualitas dan profesional. Dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, RSUD Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dalam mencapai visi dan mewujudkan misi Kabupaten Buleleng yang telah diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022, RSUD Kabupaten Buleleng kemudian menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut: Tujuan jangka menengah yang ditetapkan RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 adalah “Meningkatkan upaya dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dari pelayanan yang diberikan adalah “Meningkatnya mutu dan pelayanan kesehatan rujukan RSUD Kabupaten Buleleng”.

Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

#### **2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama**

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja dibawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan RSUD secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam

satu tahun tertentu. Dalam Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, dijabarkan kembali target pencapaian indikator kinerja pada setiap triwulan. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini dapat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji dalam Perjanjian Kinerja tahunan yang telah ditetapkan oleh para pejabat dilingkungan RSUD Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap aparatur.

Dengan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja RSUD dan diharapkan dapat memacu pihak terkait untuk lebih meningkatkan kinerjanya serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasan dan kepada masyarakat. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui

Direktur RSUD Kabupaten Buleleng

**(dr. Putu Arya Nugraha, Sp. PD.)**

NIP. 19750601 200212 1 009

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggungjawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		Uraian	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	36.191.895.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	36.191.895.000,00	Direktur RSUD Kabupaten Buleleng
						Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase pelayanan kesehatan sesuai prosedur	114.000.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	114.000.000.000,00	Direktur RSUD Kabupaten Buleleng	
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	82	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	38.017.353.300,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	38.017.353.300,00	Direktur RSUD Kabupaten Buleleng

Singaraja, 2021  
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Buleleng



dr. Puji Arya Nugraha, Sp.PD

Iva / Pembina

NIP. 19750601 200212 1 009

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran	Sub Kegiatan		Anggaran	Penanggungjawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase pelayanan kesehatan sesuai prosedur	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	38.017.353.300,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	38.017.353.300,00	Wadir Pelayanan RSUD Kabupaten Buleleng
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan sesuai prosedur	49.938.591.550,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit		
2	Meningkatnya pengembangan kapasitas SDM yang sesuai standar	Persentase pengembangan kapasitas SDM yang sesuai standar	25,00%	50,00%	75,00%	90,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengembangan kapasitas SDM yang sesuai standar	36.191.895.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	36.191.895.000,00	Wadir SDM RSUD Kabupaten Buleleng
								Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan sesuai prosedur	21.090.447.200,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	21.090.447.200,00	
3	Meningkatnya tata kelola administrasi rumah sakit yang sesuai ketentuan	Persentase pengelolaan administrasi rumah sakit yang tepat waktu	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengelolaan administrasi rumah sakit yang tepat waktu	42.970.961.250,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	42.970.961.250,00	Wadir Keuangan RSUD Kabupaten Buleleng

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran	Sub Kegiatan		Anggaran	Penanggungjawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Opini Pengelola Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar	Wajar	Wajar	Wajar			Opini pengelola keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP)					

Singaraja, 2021  
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Buleleng



dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD  
IVa / Pembina  
NIP. 19750601 200212 1 009

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran	Sub Kegiatan		Anggaran	Penanggungjawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Terwujudnya pelayanan medik sesuai standar	Persentase pelayanan medik sesuai pedoman	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan medik sesuai pedoman	38.017.353.300,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	38.017.353.300,00	Kabag Pelayanan Medik
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan sesuai prosedur	5.571.402.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	5.571.402.000,00	
2	Terwujudnya pelayanan penunjang sesuai standar	Persentase pelaksanaan pelayanan penunjang sesuai pedoman	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan pelayanan penunjang sesuai pedoman	43.750.026.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	43.660.026.000,00	Kabag Pelayanan Penunjang
3	Terwujudnya pelayanan keperawatan sesuai standar	Persentase pelaksanaan pelayanan keperawatan sesuai pedoman	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan pelayanan keperawatan sesuai pedoman	617.163.550,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	617.163.550,00	Kabag Pelayanan Keperawatan
4	Terwujudnya kapasitas SDM sesuai kualifikasi	Persentase SDM yang memenuhi kualifikasi	20,00%	40,00%	60,00%	90,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SDM yang memenuhi kualifikasi	36.191.895.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	36.191.895.000,00	Kabag Kesekretariatan dan SDM
	Terwujudnya regulasi rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku	Persentase Dukomen regulasi sesuai standar	20,00%	40,00%	60,00%	90,00%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dokumen regulasi sesuai standar	19.454.096.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	19.454.096.000,00	



5	Terwujudnya kapasitas SDM sesuai kompetensi	Persentase SDM yang sesuai kompetensi	20,00%	40,00%	60,00%	85,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase SDM yang sesuai kompetensi	740.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	740.000.000,00	Kabag Pendidikan dan Penelitian
6	Meningkatnya informasi pelayanan dan kehumasan sesuai regulasi	Persentase layanan informasi sesuai SOP	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan informasi sesuai SOP	896.351.200,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	896.351.200,00	Kabag Pelaporan dan Informasi
	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pelaporan sesuai pedoman	Persentase pelaksanaan pelaporan sesuai pedoman	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			Persentase pelaksanaan pelaporan sesuai pedoman					
7	Terwujudnya pengelolaan perencanaan rumah sakit sesuai ketentuan	Persentase program/kegiatan dan penganggaran yang tepat waktu	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase program/kegiatan dan penganggaran yang tepat waktu	37.243.526.750,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	37.243.526.750,00	Kabag Perencanaan dan Anggaran
8	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sesuai standar	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	1.067.900.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	1.157.900.000,00	Kabag Keuangan
9	Terkelolanya aset untuk pelayanan kesehatan yang optimal	Persentase pemenuhan aset sesuai standar	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan aset sesuai standar	4.659.534.500,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	4.659.534.500,00	Kabag Aset

Singaraja, 2021  
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Buleleng



**Dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD**

IVa / Pembina  
NIP. 19750601 200212 1 009

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran	Sub Kegiatan		Anggaran	Penanggungjawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Terlaksananya monitoring pelayanan medis rawat darurat dan rawat jalan	Jumlah laporan monitoring pelayanan medis rawat darurat dan rawat jalan	25 Laporan	50 Laporan	75 Laporan	100 Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	2.595.232.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah laporan monitoring pelayanan medis rawat darurat dan rawat jalan	1.277.000.000,00	Sub Bagian Pelayanan Medis Rawat Darurat dan Rawat Jalan
	Terlaksananya evaluasi pelayanan medis rawat darurat dan rawat jalan	Jumlah laporan evaluasi pelayanan medis rawat darurat dan rawat jalan	25 Laporan	50 Laporan	75 Laporan	100 Laporan						Jumlah laporan evaluasi pelayanan medis rawat darurat dan rawat jalan		
2	Terlaksananya monitoring pelayanan medis rawat inap dan intensif	Jumlah laporan monitoring pelayanan medis rawat inap dan intensif	62 Laporan	124 Laporan	186 Laporan	250 Laporan	Memenuhkan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	38.017.353.300,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah laporan monitoring pelayanan medis rawat inap dan intensif	38.017.353.300,00	Sub Bagian Pelayanan Medis Rawat Inap dan Intensif
	Terlaksananya evaluasi pelayanan medis rawat inap dan intensif	Jumlah laporan evaluasi pelayanan medis rawat inap dan intensif	62 Laporan	124 Laporan	186 Laporan	250 Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional Rumah Sakit untuk pelayanan yang optimal	2.976.170.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah laporan evaluasi pelayanan medis rawat inap dan intensif	2.976.170.000,00	
3	Terlaksananya monitoring pelayanan keperawatan rawat inap dan rawat jalan	Jumlah laporan monitoring pelayanan keperawatan rawat inap dan rawat jalan	25 Laporan	50 Laporan	75 Laporan	100 Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	116.500.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah laporan monitoring pelayanan keperawatan rawat inap dan rawat jalan	5.500.000,00	Sub Bagian Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan

	Terlaksananya evaluasi pelayanan keperawatan rawat inap dan rawat jalan	Jumlah laporan evaluasi pelayanan keperawatan rawat inap dan rawat jalan	25 Laporan	50 Laporan	75 Laporan	100 Laporan						Jumlah laporan Evaluasi pelayanan keperawatan rawat inap dan rawat jalan	111.000.000,00	
4	Terlaksananya monitoring pelayanan medis rawat darurat dan rawat jalan	Jumlah laporan monitoring pelayanan keperawatan rawat darurat dan rawat intensif	30 Laporan	60 Laporan	90 Laporan	120 Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	500.663.550,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah laporan monitoring pelayanan keperawatan rawat darurat dan rawat intensif	250.331.775,00	Sub Bagian Pelayanan Keperawatan Rawat Darurat dan Rawat Intensif
	Terlaksananya evaluasi pelayanan medis rawat darurat dan rawat jalan	Jumlah laporan evaluasi pelayanan keperawatan rawat darurat dan rawat intensif	30 Laporan	60 Laporan	90 Laporan	120 Laporan						Jumlah laporan evaluasi pelayanan keperawatan rawat darurat dan rawat intensif	250.331.775,00	
5	Terlaksananya monitoring pelayanan penunjang medis	Jumlah monitoring pelayanan penunjang medis	36 Laporan	72 Laporan	108 Laporan	144 Laporan	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	21.400.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah monitoring pelayanan penunjang medis	10.700.000.000,00	Sub Bagian Penunjang Medis
	Terlaksananya evaluasi pelayanan penunjang medis	Jumlah evaluasi pelayanan penunjang medis	36 Laporan	72 Laporan	108 Laporan	144 Laporan						Jumlah evaluasi pelayanan penunjang medis	10.700.000.000,00	
6	Terlaksananya monitoring pelayanan penunjang non medis	Jumlah laporan monitoring pelayanan penunjang non medis	36 Laporan	72 Laporan	108 Laporan	144 Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	22.350.026.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah laporan monitoring pelayanan penunjang non medis	20.434.326.000,00	Sub Bagian Penunjang Non Medis
	Terlaksananya evaluasi pelayanan penunjang non medis	Jumlah laporan evaluasi pelayanan penunjang non medis	36 Laporan	72 Laporan	108 Laporan	144 Laporan						Jumlah laporan evaluasi pelayanan penunjang non medis	1.915.700.000,00	
7	Tersedianya SDM sesuai berkualifikasi	Jumlah laporan SDM sesuai kualifikasi	464 Laporan	464 Laporan	464 Laporan	464 Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	36.191.895.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan gaji dan tunjangan ASN	36.191.895.000,00	Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

								Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	16.442.096.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah laporan SDM sesuai kualifikasi	16.442.096.000,00	
8	Tersedianya peraturan pelayanan rumah sakit	Jumlah dokumen regulasi	188 dokumen	387 dokumen	585 dokumen	768 dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	3.012.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen regulasi	2.698.000.000,00	Sub Bagian Tatausaha dan Organisasi
	Terlaksananya pengarsipan sesuai pedoman	Jumlah dokumen arsip dikelola sesuai prosedur	7.920 dokumen	16.722 dokumen	25.924 dokumen	34.200 dokumen						Jumlah dokumen arsip dikelola sesuai prosedur	314.000.000,00	
9	Tersedianyapelaporan kinerja Rumah Sakit	Jumlah dokumen kinerja Rumah Sakit	5 dokumen	-	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	455.513.700,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen kinerja Rumah Sakit	132.000.000,00	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
		Jumlah dukumen pelayanan Rumah Sakit	6 Dokumen	10 Dokumen	14 Dokumen	18 Dokumen						Jumlah dukumen pelayanan Rumah Sakit	323.513.700,00	
10	Terlaksananya pengembangan dan pelayanan SIM-RS	Jumlah dokumen pelayanan dan pengembangan SIMRS	2 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	440.837.500,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen pelayanan dan pengembangan SIMRS	348.987.500,00	Sub Bagian Informasi dan Humas
	Terlaksananya pelayanan kehumasan& pengaduan masyarakat	Jumlah laporan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat	3 Laporan	6 Laporan	9 laporan	12 Laporan						Jumlah laporan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat	15.000.000,00	
		Jumlah dokumen pelayanan informasi dan Humas	9 Dokumen	18 Dokumen	27 Dokumen	36 Dokumen						Jumlah dokumen pelayanan informasi dan Humas	76.850.000,00	
11	Terlaksananya kursus singkat/pelatihan kompetensi tenaga medis dan penunjang medis	Jumlah SDM yang mengikuti kursus singkat/pelatihan kompetensi medis dan penunjang medis	3 orang	11 orang	17 orang	26 orang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	380.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah SDM yang mengikuti kursus singkat/pelatihan kompetensi medis dan penunjang medis	350.000.000,00	Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medis

	Terlaksananya bimtek kompetensi medis dan penunjang medis	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek kompetensi medis dan penunjang medis	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang					Jumlah SDM yang mengikuti bimtek kompetensi medis dan penunjang medis	30.000.000,00		
12	Terlaksananya kursus singkat/pelatihan kompetensi keperawatan dan non medis	Jumlah SDM yang mengikuti kursus singkat/pelatihan kompetensi keperawatan dan non medis	70 orang	240 orang	360 orang	422 orang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	360.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah SDM yang mengikuti kursus singkat/pelatihan kompetensi keperawatan dan non medis	350.000.000,00	Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Non Medis
	Terlaksananya bimtek kompetensi keperawatan dan non medis	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek kompetensi keperawatan dan non medis	1 orang	3 orang	5 orang	10 orang						Jumlah SDM yang mengikuti bimtek kompetensi keperawatan dan non medis	10.000.000,00	
13	Tersedianya pelaporan perbendaharaan rumah sakit	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	9 Laporan	18 Laporan	27 Laporan	36 Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	824.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	824.000.000,00	Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
14	Tersedianya pelaporan verifikasi dan keuangan	Jumlah dokumen verifikasi	700 Dokumen	1600 Dokumen	2800 Dokumen	3800 Dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	243.900.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen verifikasi	194.400.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi
		Jumlah laporan keuangan	3 Laporan	7 Laporan	10 Laporan	16 Laporan						Jumlah laporan keuangan	49.500.000,00	
15	Tersedianya pelaporan aset	Jumlah laporan aset yang didistribusikan	1.500 Laporan	3.000 Laporan	4.500 Laporan	6.000 Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	1.713.332.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah laporan aset yang didistribusikan	339.405.000,00	Sub Bagian Penatausahaan Barang
		Jumlah laporan persediaan barang	3 Laporan	7 Laporan	10 Laporan	15 Laporan						Jumlah laporan persediaan barang	1.373.927.000,00	

16	Terkelolanya semua sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah laporan sarana dan prasarana (sarpras)	3500 Laporan	3500 Laporan	3500 Laporan	13500 Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	2.946.202.500,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah laporan sarana dan prasarana (sarpras)	1.610.172.500,00	Sub Bagian Perlengkapan
	Tersedianya pelaporan aset	Jumlah Laporan Aset	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	25 Laporan						Jumlah Laporan Aset	1.336.030.000,00	
17	Tersedianya dokumen anggaran	Jumlah dokumen anggaran tersusun tepat waktu	8 Dokumen	9 Dokumen	15 Dokumen	16 Dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	33.463.798.750,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen anggaran tersusun tepat waktu	33.463.798.750,00	Sub Bagian Penyusunan Anggaran
18	Tersedianya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan tersusun tepat waktu	1 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pelayanan yang optimal	3.779.728.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen perencanaan tersusun tepat waktu	3.779.728.000,00	Sub Bagian Perencanaan

Singaraja, 2021

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Buleleng



**dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD**

Pembina  
NIP. 19750601 200212 1 009